

TIDAK DIFINJAMKAN KELUAR

PERANAN KAUM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA
DALAM MEMPERJUANGKAN PETISI SOETARDJO

SKRIPSI



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER



Oleh :

Nurhasyim

9402105204

9538
Nur
P

| | | |
|-------------|-------------|------|
| Anal | Metode | Klas |
| Terima Tali | 04 SEP 2000 | |
| No. Buk | 10 - 2871 | |

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER

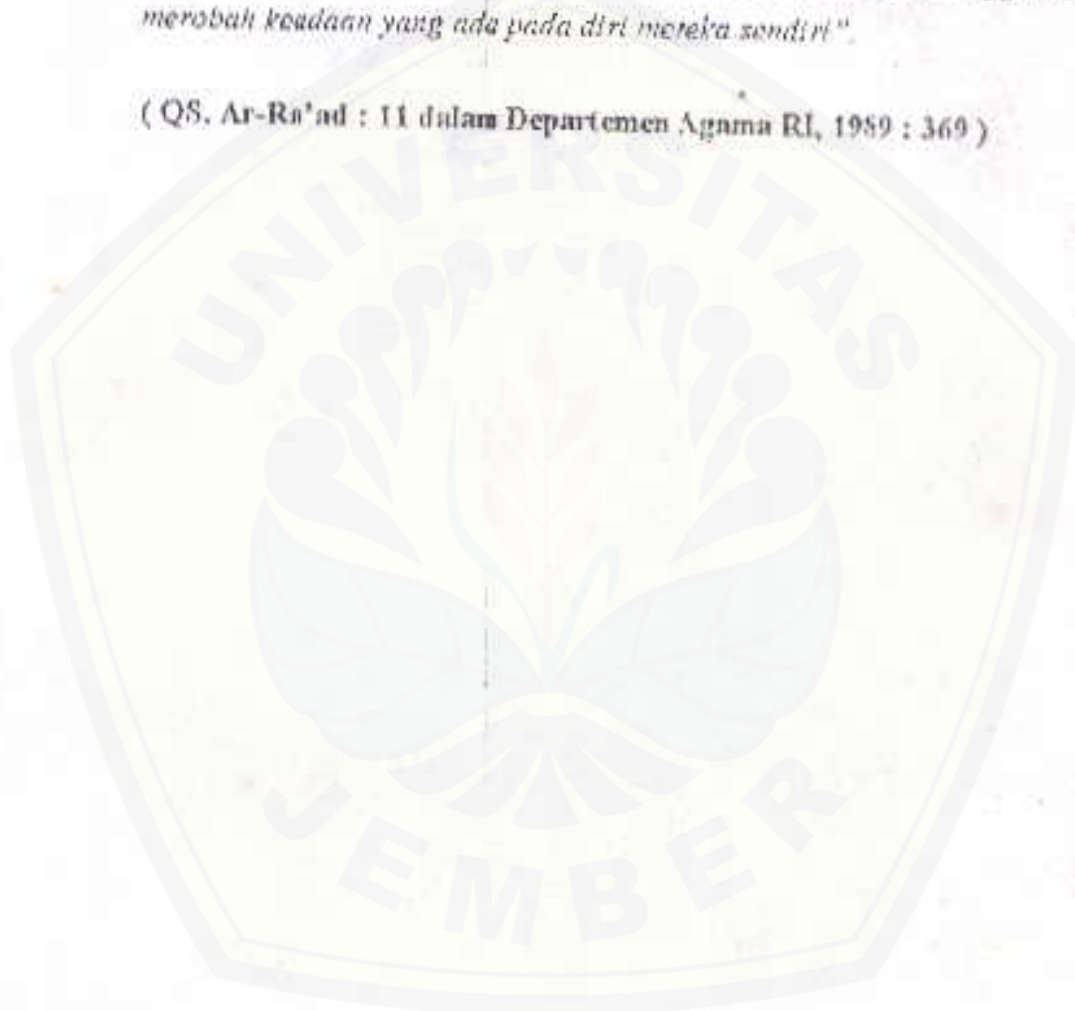
Mel 2000

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَمَّا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿سورة الزمر: ١١﴾

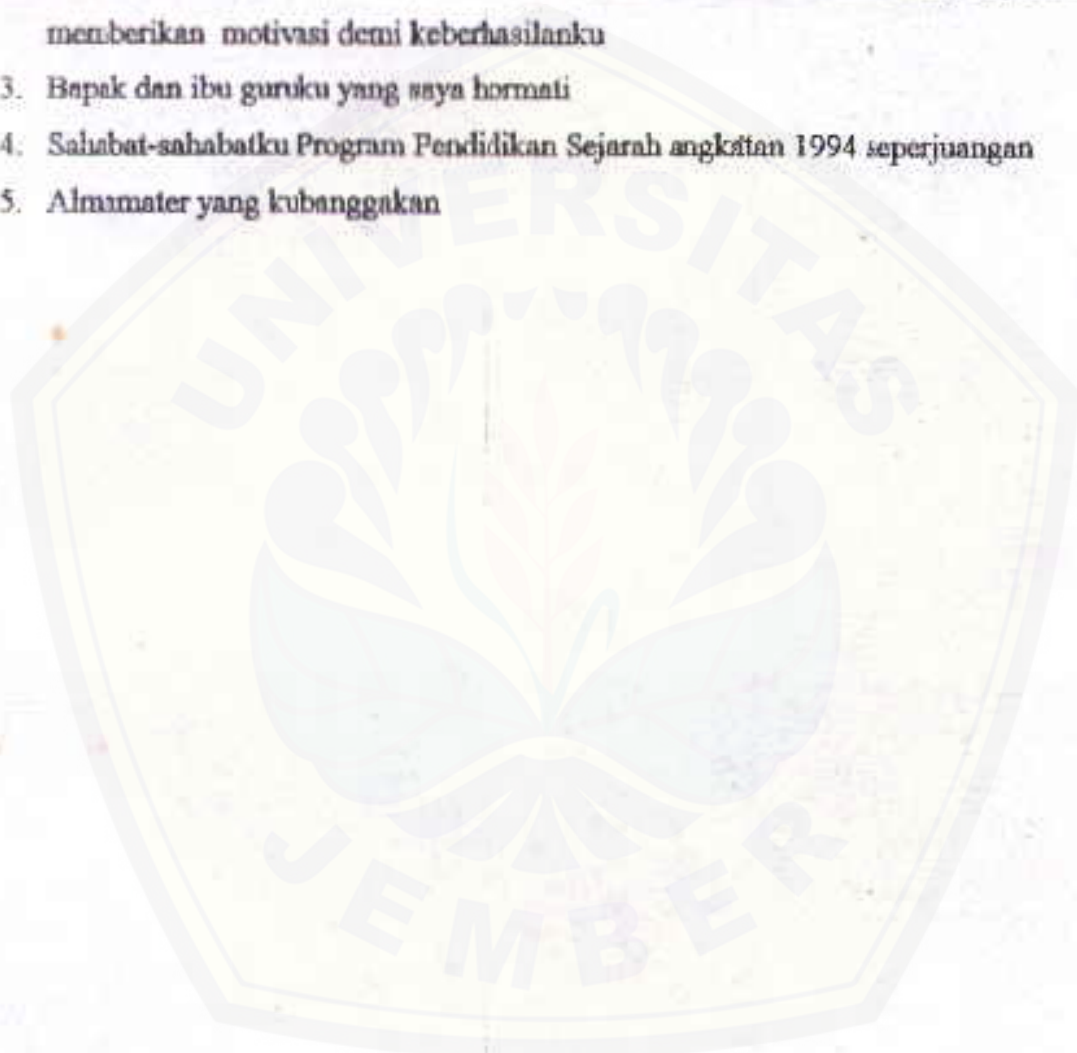
Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".

(QS. Ar-Ra'ad : 11 dalam Departemen Agama RI, 1989 : 369)



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah berusaha dan berdoa untuk keberhasilanku dalam menuntut ilmu
2. Kakakku Alam, Eko, Tutik, dan adikku Iskandar Muda serta Budi yang telah memberikan motivasi demi keberhasilanku
3. Bapak dan ibu guruku yang saya hormati
4. Sahabat-sahabatku Program Pendidikan Sejarah angkatan 1994 seperjuangan
5. Almamater yang kubanggakan



PERANAN KAUM PERGERAKAN NASIONAL INDONESIA DALAM
MEMPERJUANGKAN PETISI SOETARDJO

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Spesialisasi Program Pendidikan Sejarah Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Jember

Oleh :

Nama : NURHASYIM
Nim : 9402105204
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program : Pendidikan Sejarah
Angkatan : 1994
Daerah Asal : Cilacap
Tempat, tanggal lahir : Cilacap , 09 Mei 1973

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

DRS. SUMARNO

NIP. 131 403 352

Pembimbing II,

DRA. SRI HANDAYANI

NIP. 131 472 786

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Jember sebagai skripsi


Pada hari : Jum'at

Tanggal : 05 Mei 2000

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Universitas Jember

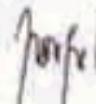
Tim Penguji :

Ketua,



DEA SRI HANDAYANI
NIP. 131 472 786

Sekretaris,



DRA NURUL UMAMAH
NIP. 132 052 408

Anggota :

1. DRS. SURANTO, M.Pd.
NIP. 131 759 834

2. DRS. SUMARNO
NIP. 131 403 352



Mengetahui

Dekan,



DR. SOEKARDJO BW

NIP. 130 287 101

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat

1. Rektor Universitas Jember
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember
3. Kepala UPT Perpustakaan - Universitas Jember
4. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP - Universitas Jember
5. Ketua Program Pendidikan Sejarah FKIP - Universitas Jember
6. Pembimbing I dan Pembimbing II
7. Semua Dosen FKIP - Universitas Jember
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

Penulis mendoakan semoga amal baik mereka diberi imbalan oleh Allah SWT. Amien.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun demi baiknya skripsi ini.

Jember, 5 Mei 2000

Penulis

RINGKASAN

NURHASYIM, Mei 2000, Peranan Kaum Pergerakan Nasional Indonesia Dalam Memperjuangkan Petisi Soetardjo, Skripsi, Program Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan – Universitas Jember

Pembimbing : (I) Dra. Sumarno
(II) Dra. Sri Handayani

Kata Kunci : (1) Kaum Pergerakan Nasional Indonesia,
(2) Petisi Soetardjo

Peranan Kaum Pergerakan Nasional Indonesia Dalam Memperjuangkan Petisi Soetardjo sangat besar dan berpengaruh sekali. Munculnya petisi Soetardjo disebabkan oleh karena rasa ketidak puasan bangsa Indonesia terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Bangsa Indonesia merasa hidupnya sangat menderita dan hak – hak kebebasan hidup tidak pernah diperoleh. Gubernur Jenderal yang berkuasa di Indonesia adalah salah seorang yang selalu bersikap reaksioner terhadap semua gerakan yang ada, gerakan – gerakan yang ada dan dianggap membahayakan posisi Pemerintah Kolonial Belanda selalu ditindak dengan tegas apalagi gerakan – gerakan yang bersifat non kooperasi. Pada tahun 1936 terjadi pergantian pemimpin dari Gubernur Jenderal C.B. de Jonge kepada Gubernur Jenderal Tjarda, Gubernur Jenderal yang baru ini bersikap sedikit lebih lunak. Kaum pergerakan nasional Indonesia mempunyai gagasan atau ide menyampaikan usulan atau petisi, usulan ini yang nantinya akan terkenal dengan istilah petisi Soetardjo.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah peranan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo?"

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : (1) akan mendapat gambaran yang utuh dan benar tentang perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo; (2) akan mendapat gambaran yang benar dan obyektif tentang perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo; (3) dapat mengetahui secara jelas, benar dan obyektif tentang perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo. Selain manfaat tersebut di atas, penelitian ini juga akan bermanfaat: (1) bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapat pengalaman dalam rangka pengembangan ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan sejarah, terutama yang berhubungan dengan peranan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan Petisi Soetardjo; (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan guna memperdalam materi sejarah pergerakan nasional Indonesia. Hal ini sangat penting karena termasuk salah satu dari sepuluh

kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru, khususnya kemampuan dasar tentang penguasaan materi, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sebagai guru sejarah sekaligus peneliti sejarah; (3) bagi para ilmuwan sejarah, merupakan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut; (4) bagi almamater, dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dipergustakaan Universitas Jember,

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 1999 sampai dengan bulan Pebruari 2000, dengan Studi literatur sehingga tempat penelitian adalah perpustakaan. Metode penentuan tempat penelitian adalah purposive sampling. Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah UPT Perpustakaan - Universitas Jember, Perpustakaan FKIP - Universitas Jember. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian sejarah, dengan langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Berdasarkan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo yaitu melalui Volksraad dan di luar Volksraad. Kaum pergerakan nasional Indonesia bersikap ada yang mendukung dan ada yang menolak namun akhirnya petisi menjadi petisi Volksraad. Setelah diajukan kepada pemerintah negeri Belanda dan Ratu kemudian Petisi di tolak. Ditolaknya petisi kemudian membawa dampak bagi kaum pergerakan nasional Indonesia dengan ditandai berdirinya GAPKI.

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan tersebut adalah: (1) mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih banyak membaca literatur tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan dan memperdalam penguasaan materi, (2) pembaca, hendaknya setelah membaca skripsi ini bisa memetik hikmah dari perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetarjo, bahwa untuk menempuh segala macam bentuk perjuangan sebaiknya disiapkan langkah yang lebih matang dan dilakukan bukan dengan jalan meminta-minta. (3) almamater, hendaknya selalu memberi motivasi kepada mahasiswa maupun kepada seluruh civitas akademika dalam pelaksanaan penelitian sejarah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sejarah, juga hendaknya almamater lebih meningkatkan pelayanan dan penyediaan buku - buku (literatur) khususnya yang berhubungan dengan sejarah pergerakan nasional Indonesia agar penelitian ini dapat terus dikembangkan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN MOTTO | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN PENGAJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| RINGKASAN | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan | 1 |
| 1.2 Definisi Operasional Variabel | 3 |
| 1.3 Ruang lingkup dan Rumusan Permasalahan | 4 |
| 1.3.1 Ruang lingkup | 4 |
| 1.3.2 Rumusan Permasalahan | 5 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.5 Manfaat Penelitian | 6 |
| | |
| BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN | |
| 2.1 Kondisi Pemerintahan Kolonial Belanda | 8 |
| 2.2 Sistem Birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda | 10 |
| 2.3 Kondisi Pergerakan Nasional Indonesia | 13 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| 3.1 Pengertian Metode Penelitian | 15 |
| 3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah | 16 |

| | |
|--|----|
| 3.2.1 Heuristik..... | 16 |
| 3.2.2 Kritik..... | 17 |
| 3.2.3 Interpretasi..... | 17 |
| 3.2.4 Historiografi..... | 18 |
| 3.3 Metode Penentuan tempat penelitian | 18 |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data | 20 |
| 3.5 Metode Analisis Data | 20 |
| 3.5.1 Tektik Logika Induktif..... | 21 |
| 3.5.2 Teknik Logika Komparatif..... | 21 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Latar Belakang Kaum Pergerakan Nasional Indonesia Dalam Memperjuangkan Petisi Soetardjo..... | 23 |
| 4.2. Proses Perjuangan Kaum Pergerakan Nasional Indonesia Dalam Memperjuangkan Petisi Soetardjo..... | 27 |
| 4.2.1 Strategi Kaum Pergerakan Nasional Indonesia Dalam Memperjuangkan Petisi Soetardjo..... | 28 |
| 4.2.1.1 Perjuangan Di Dalam Volksraad..... | 28 |
| 4.2.1.2 Perjuangan DI Luar Volksraad..... | 30 |
| 4.2.2 Reaksi Kaum Pergerakan Nasional Indonesia dan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Petisi Soetardjo..... | 31 |
| 4.2.2.1 Reaksi Kaum Pergerakan Nasional Indonesia..... | 32 |
| 4.2.2.2 Reaksi Pemerintah Kolonial Belanda..... | 33 |
| 4.3 Hasil dan Dampak Perjuangan Kaum Pergerakan Nasional Indonesia Dalam Memperjuangkan Petisi Soetardjo..... | 35 |

| | |
|-------------------|----|
| 4.3.1 Hasil..... | 35 |
| 4.3.2 Dampak..... | 35 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|------------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan..... | 37 |
| 5.2 Saran – Saran..... | 37 |

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Surat Keterangan Ijin Studi Literatur dari Kepala UPT
Perpustakaan - Universitas Jember

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RALAT

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Abad XX dalam lembaran sejarah Indonesia disebut sebagai abad kebangkitan nasional, dimana pertumbuhan kesadaran nasional muncul dari proses atau melalui langkah – langkah yang wajar yaitu dengan adanya ide melepaskan diri dari status yang serba terbelakang menuju kearah pertumbuhan di segala aspek kehidupan yang lebih baik, salah satunya dalam bidang politik. Keadaan politik bangsa Indonesia pada saat itu tidak menentu, oleh karena itu bangsa Indonesia memulai langkah perjuangan. Perjuangan yang dilakukan kaum pergerakan nasional mempunyai tujuan utama yaitu untuk memperjuangkan kehidupan dalam mencapai negara yang merdeka dan bebas dari tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda (Sartono Kartodirjo, 1990: 120).

Gubernur Jenderal yang berkuasa di Indonesia antara tahun 1931 – 1936 adalah Jenderal Bonafacus Cornelis de Jonge. Ia dalam menjalankan tugasnya bersikap sangat keras dan reasioner terhadap semua pergerakan nasional, sehingga kaum pergerakan nasional tidak dapat menjalankan aksinya, terutama kaum pergerakan nasional yang bersikap non kooperatif (D.M.G. Koch, 1951: 114). Pemerintah kolonial Belanda memandang kaum pergerakan nasional Indonesia yang bersikap non kooperatif sebagai musuh yang dapat mengganggu stabilitas keamanan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Akibat adanya tekanan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kolonial tersebut, maka partai-partai politik yang non kooperatif tidak dapat berkembang dengan baik.

Berdasarkan keadaan pergerakan nasional yang semakin tertekan serta menghadapi penindasan dari pemerintah kolonial, maka diperlukan taktik perjuangan yaitu dengan taktik kooperatif, karena taktik non kooperatif mengalami kesulitan di dalam melaksanakan perjuangannya. Usaha baru yang dilakukan oleh partai-partai politik dan organisasi-organisasi di Indonesia adalah bergerak melalui parlemen atau Dewan Rakyat dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.

Pengangkatan Tjarda Van Starckenborg Sachouwer menjadi Gubernur Jendral di Indonesia menggantikan de Jonge, mendorong semangat kaum pergerakan nasional mendesak kepada pemerintah supaya pemerintah mengadakan pembaharuan yang demokratis dalam pemerintahan. Pembaharuan ini secepatnya perlu diwujudkan karena jauh sebelumnya pernah dibicarakan. Tuntutan penting yang menghendaki pembaharuan itu ialah apa yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo yang diajukan lewat dan dengan dukungan Volkraad (Anhar Gonggong, 1985:45).

Usul Soetardjo yang menyangkut otonomi atau hal-hal yang berkaitan dengan susunan ketatanegaraan itu sesuatu yang wajar sebab saat itu perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintah semakin meningkat. Hal ini terutama setelah de Jonge memerintah. Bonaficus Cornelis de Jonge adalah salah seorang Gubernur Jendral yang sangat reaksioner. Menurut Soetardjo hubungan baik antara Belanda dan Hindia Belanda seharusnya semakin lebih ditingkatkan ini semata-mata demi keuntungan dan kepentingan kedua belah pihak (Sartono Kartodirdjo, 1993 : 183).

Petisi Soetardjo ternyata mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak baik dari orang-orang Indonesia maupun Belanda, yang bernada setuju maupun yang bernada menolak petisi. Untuk itu maka diperlukan perjuangan agar petisi Soetardjo mendapat dukungan yang menyeluruh dari kaum pergerakan nasional baik yang ada didalam Volksraad maupun yang ada diluar Volksraad yang merupakan sebagai penyokong agar petisi dapat diterima oleh pemerintah kolonial Belanda dan Kerajaan Belanda.

Selain alasan-alasan yang dikemukakan di atas, pemilihan permasalahan ini juga didasarkan atas pendapat Sutrisno Hadi yang menyatakan: (1) topik masih dalam jangkauan peneliti, (2) tersedianya sumber-sumber(data-data), (3) topik cukup penting untuk diteliti, (4) topik menarik minat untuk diteliti(1985:51). Alasan lain topik belum pernah diteliti oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Jember serta kesediaan dari dosen pembimbing dalam membimbing penulis dalam penelitian ini. Kecuali alasan-alasan di atas, masih ada hal lain yang perlu penulis kemukakan, yaitu bahwa

sebagai calon guru sejarah yang profesional, dipersyaratkan menguasai sepuluh kemampuan dasar guru, kemampuan dasar tentang penguasaan materi. Dengan meneliti atau mengkaji peranan Petisi Soetardjo dalam pergerakan nasional Indonesia, maka penguasaan materi mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia akan tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini, dan dirumuskan dalam kalimat judul "Peranan Petisi Soetardjo Dalam Pergerakan Nasional Indonesia."

1.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka perlu penulis jelaskan pengertian masing-masing variabelnya. Adapun variabel-variabel dalam penelitian ini adalah (1) Peranan Kaum Pergerakan, (2) Petisi Soetardjo

1.2.1 Peranan Kaum Pergerakan Nasional Indonesia

Kebangkitan nasional Indonesia tanggal 20 Mei 1908 yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo adalah proses awal perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia yang bersifat moderat. Dari proses perjuangan tersebut kemudian tercapai kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 (Susanto Tirtoprojo, 1986:7).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan Peranan Kaum Pergerakan Nasional Indonesia adalah aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui organisasi modern dalam melawan pemerintah kolonial untuk mencapai kemerdekaan.

Peranan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo adalah perjuangan yang dilakukan oleh kaum pergerakan yang mengusulkan dan mendukung petisi yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikusumo kepada pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 15 Juli 1936 agar diadakan konferensi kerajaan Belanda yang membahas status politik yang berupa otonomi

yang masih ada dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda pada pemerintah kolonial Belanda dan Kerajaan Belanda (Suhartono, 1994 : 93).

1.2.2 Petisi Soetardjo

Menurut Suhartono Petisi Soetardjo adalah usulan yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikusumo kepada pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 15 Juli 1936 agar diadakan konferensi kerajaan Belanda yang membahas status politik yang berupa otonomi yang masih ada dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda (1994: 93). Petisi Soetardjo juga diartikan sebagai usulan yang dicetuskan oleh Soetardjo Kartohadikusumo pada bulan Juli 1936 (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1992:221). Petisi Soetardjo diajukan lewat dan dengan dukungan Volksraad. Petisi yang di kemukakan oleh Soetardjo Kartohadikusumo sebagai wakil dari Persatuan Pegawai Bestuur Bumiputera (PPBB) yang duduk dalam Volksraad tersebut juga didukung bersama 5 anggota Volksraad lainnya yaitu Kasimo, Estulangi, Datuk Tumenggung, Alatas, dan Ko Kwat Tiong.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan Petisi Soetardjo adalah gagasan yang dikemukakan oleh kaum pergerakan yang mengusulkan dan mendukung petisi yang diajukan oleh Soetardjo Kartohadikusumo kepada pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 15 Juli 1936 agar diadakan konferensi kerajaan Belanda yang membahas status politik yang berupa otonomi yang masih ada dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda pada pemerintah kolonial Belanda dan Kerajaan Belanda.

1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

1.3.1 Ruang Lingkup.

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkungnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mely G. Tan yang mengatakan bahwa kalau masalah sudah terpilih, perlu ditentukan ruang lingkungnya agar peneliti tidak terjerumus kedalam banyaknya data yang akan diteliti (Koentjaraningrat, 1991:17).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian ini mengambil ruang lingkup waktu atau temporal tahun 1936 – 1938. Tahun 1936 dijadikan sebagai batas awal penelitian, karena pada tahun tersebut merupakan waktu diajukannya Petisi Soetardjo. Sedangkan tahun 1938 dijadikan sebagai batas akhir penelitian, karena merupakan akhir dari kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo yang di tandai dengan keputusan atau tanggapan dari pemerintah kolonial Belanda yang menolak petisi.

Sedangkan obyek atau fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia yang mengusulkan dan mendukung Petisi Soetardjo dalam pergerakan nasional Indonesia. Jadi tujuan yang diperjuangkan dalam petisi Soetardjo adalah menuntut diberikannya otonomi terhadap Indonesia sesuai dengan ketentuan UUD Negeri Belanda, sebab kaum pergerakan nasional Indonesia yang memperjuangkan petisi Soetardjo pada saat itu tidak menginginkan kemerdekaan secara penuh, namun otonomi yang masih dalam lingkungan pemerintahan kolonial Belanda.

1.3.2 Rumusan Permasalahan

Setiap penelitian selalu bertitik tolak dari permasalahan, maka seorang peneliti perlu untuk merumuskan secara tegas permasalahan dalam rencana penelitiannya. Suharsim Arikunto menjelaskan, bahwa rumusan permasalahan penelitian disebut juga ancer-ancer kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan (1989: 4). Menurut Winarno Surakhmad, Permasalahan merupakan hal yang pertama kali harus difikirkan sebelum suatu penelitian dilakukan (1989 : 33)

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan Petisi soetardjo ?

Untuk membahas atau menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis tidak merumuskan hipotesis secara eksplisit, dengan alasan bahwa penelitian semacam ini adalah bersifat deskriptif, yaitu memaparkan apa adanya dari berbagai aspek. Sedangkan menurut Winarno Surakhmad di dalam penelitian historik yang

bersifat deskriptif, peneliti tidak harus merumuskan hipotesis penelitian secara eksplisit (1990:129).

1.4 Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengungkapkan secara jelas dan mendalam mengenai peranan kaum pergerakan nasional dalam memperjuangkan Petisi Soetardjo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. akan mendapat gambaran yang utuh dan benar tentang perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo;
2. akan mendapat gambaran yang benar dan obyektif tentang perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo;
3. dapat mengetahui secara jelas, benar dan obyektif tentang perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo.

Selain manfaat tersebut di atas, penelitian ini juga akan bermanfaat:

1. bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapat pengalaman dalam rangka pengembangan ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan sejarah, terutama yang berhubungan dengan peranan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan Petisi Soetardjo;
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan guna memperdalam materi sejarah pergerakan nasional Indonesia. Hal ini sangat penting karena termasuk salah satu dari sepuluh kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh seorang guru, khususnya kemampuan dasar tentang penguasaan materi, sehingga dapat meningkatkan profesionalisme sebagai guru sejarah sekaligus peneliti sejarah;
3. bagi para ilmuwan sejarah, merupakan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut.

4. bagi almanater, dapat menambah perbendaharaan kepustakaan diperpustakaan Universitas Jember,



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Pemerintahan Kolonial Belanda (1916 - 1931)

Pemerintahan kolonial Belanda abad XX yang menganut sistem politik reaksioner menyebabkan timbulnya suatu aksi pergerakan nasional Indonesia yang bersikap radikal. Sikap radikal dari kaum pergerakan nasional terbukti dengan adanya berbagai pemberontakan - pemberontakan yang ada misalnya pemberontakan PKI pada tahun 1926 - 1927.

Perubahan administrasi kolonial Belanda yang terjadi pada tahun 1916 dengan ditandai pembentukan Volksraad. Gagasan ini sebenarnya sudah pernah dibahas semenjak tahun 1900. Volksraad pertama dibentuk tidak bisa disamakan dengan parlemen, karena Volksraad ini hanya diberikan kekuasaan sebagai penasihat. Dengan sendirinya, kemudian tidak mengherankan apabila para anggota Volksraad kemudian memberikan kritik keras. Para anggota Volksraad membentuk suatu oposisi pada pemerintah kolonial Belanda (Sartono Karthodirdjo, 1967 : 9 - 10).

Bukan hanya oposisi yang ada pada saat itu, namun dalam seg. pergerakan nasional Indonesia, banyak kalangan kaum pergerakan nasional Indonesia yang merasa tidak puas dengan kondisi pemerintahan kolonial Belanda. Kondisi pemerintahan yang demikian selanjutnya akan menimbulkan suatu ketidakpuasan atau pemberontakan - pemberontakan. Sejak adanya pemberontakan PKI sikap pemerintah kolonial Belanda terhadap kaum pergerakan sedikit mengalami perubahan. Pidato Gubernur Jenderal de Graaf pada tanggal 15 Mei 1929 mengatakan " bagaimana tentang kaum nasionalis revolusioner yang tahun - tahun sebelumnya dirasa dapat mengancam pemerintahan kolonial Belanda sejauh mungkin dapat ditekan supaya tidak membahayakan posisi pemerintahan kolonial Belanda " (Louis Gottschalk, 1975 : 154). Untuk itu ide de Graaf membagi kaum nasionalis menjadi dua kelompok yaitu nasionalis revolusioner dan nasionalis evolusioner. Untuk menangani masalah - masalah pergerakan nasional, Gubernur jenderal de Graaf mendapat masukan dari Van der Plas yang bertugas sebagai

penasihat masalah bumi putera tentang cara menghadapi kaum nasionalis revolusioner. Salah satu rekomendasinya adalah agar pemerintah menjalankan suatu politik yang memisahkan kaum nasionalis revolusioner dengan nasionalis evolusioner. Apabila dikaji langkah ini sebenarnya merupakan taktik pemecah belah (Susanto Tirtoprodjo, 1984 : 53 -54).

Pada bulan Juli 1929 pemerintah secara terbuka mengemukakan kembali garis - garis besar kebijaksanaannya didalam Volksraad. Dalam hal ini menunjukkan secara khusus kepada kaum pergerakan yang radikal. Pemerintah menunjukkan sikapnya sebagai suatu sikap observasi yang sangat hati - hati, tetapi sekaligus memperingatkan bila ketertiban umum berdasarkan keadaan terancam, maka pemerintah tidak ragu - ragu campur tangan.

Dalam menghadapi kegiatan - kegiatan partai politik yang non kooperasi, pemerintah dengan keras memperingatkan kepada kaum nasionalis dengan ultimatum :

" Jika orang - orang berbicara ekstrim, maka secara umum yang dianggap termasuk didalamnya adalah setiap tindakan lain yang tidak diinginkan baik yang bersifat politik maupun organisasi - organisasi buruh. Dalam hubungannya dengan ekstrimisme, pemerintah secara serius memperingatkan kepada kaum pergerakan yang radikal untuk terakhir kalinya. Jika harapan pemerintah dikecewakan, maka pemerintah harus mengadakan campur tangan dan mengambil tindakan tegas terhadap para pemimpinnya dan barangkali terhadap gerakan itu sendiri " (Bluberbger, 1970 : 109).

Meningkatnya kegiatan politik nonkooperasi mengakibatkan Jaksa Agung mengeluarkan instruksi - instruksi untuk mengadakan penggeledahan - penggeledahan terhadap rumah - rumah para pemimpin yang bersikap radikal, misalnya tokoh - tokoh dari PNI. Tokoh - tokoh tersebut antara lain Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuprodjo dan Supranata. Mereka telah dianggap menyebar luaskan propaganda yang mengganggu ketertiban umum (John Ingleson, 1986 : 174 - 175).

Kondisi pemerintahan kolonial Belanda yang bersikap reaksioner terus berlanjut sampai di gantikannya dari Gubernur Jenderal de Graaf oleh Gubernur Jenderal yang baru yaitu de Jonge pada tahun 1931, seperti pergerakan nasional

Indonesia tidak diakui eksistensinya, beberapa peraturan mengenai larangan berkumpul dan mengadakan rapat - rapat tertentu yang diadakan oleh kaum pergerakan nasional, bagi para pegawai yang mengabungkan diri pada kegiatan politik mendapat sanksi atau hukuman. Semua ini masih tetap berlanjut sampai dengan terjadinya pergantian pemerintahan kolonial Belanda yang baru dan semua ini selaras dengan politik pemerintahan Belanda yang reaksioner. Kondisi masa pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge tidak pernah mengenal kompromi terhadap kaum pergerakan yang radikal, sehingga pada masa ini digambarkan sebagai masa pemerintahan yang kaku dan sangat otoriter (D.M.G. Koch, 1951 : 241).

2.2 Sistem Birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda

Pada permulaan abad XX pemerintah kolonial Belanda menganut sistem birokrasi pemerintahan yang bersifat sentralisasi dan sangat ekstrim. Birokrasi yang sangat kaku dan otokrasi yang mutlak. Tidak ada badan politik satupun yang menjadi alat penyalur suara rakyat. Sejumlah pegawai Belanda ditempatkan di unit - unit pemerintahan di berbagai tingkatan yaitu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Mereka difungsikan sebagai penasihat merangkap sebagai pengawas bagi para pejabat pribumi. Lembaga - lembaga yang ada pada saat itu dipandang sebagai lembaga atau badan yang tidak bersifat demokratis sebab semua anggotanya mayoritas yang duduk pada lembaga tersebut dengan cara penunjukan (Sartono Kartodirdjo, 1993 : 43).

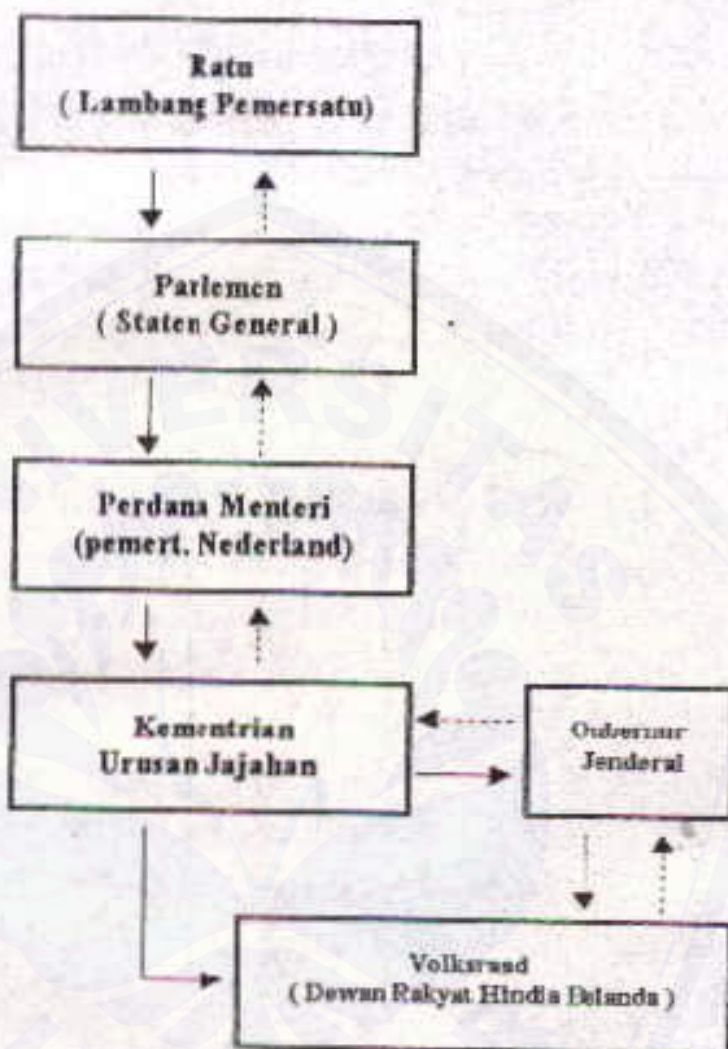
Pusat pemerintahan kolonial Belanda pada abad XX terdapat di pulau Jawa. Pengawasan terhadap pulau Jawa dan wilayah lain yang masuk pada daerah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda berada dibawah pengawasan parlemen Belanda (Staten General) yang berada dibawah kekuasaan Ratu. Mengenai pengawasan praktis terhadap masalah - masalah yang ada di daerah kolonial di bawah tanggung jawab Menteri Urusan Jajahan. Didalam menjalankan tugasnya Menteri Urusan Jajahan dibantu oleh seorang Gubernur Jenderal dan bertanggung jawab untuk menjalankan politik umum daerah kolonial jajahan. Dalam

melaksanakan tugas ini ia mempunyai kantor urusan jajahan atau Kementerian Jajahan yang berkedudukan di Den Haag (Robert Van Niel, 1958 : 15 - 16).

Pada tahun 1916 Menteri Urusan Jajahan Pleyte mengeluarkan sebuah ketetapan yaitu mengenai pembentukan Dewan Rakyat di Hindia Belanda (Volksraad). Tentang pembentukan Volksraad jauh sebelumnya pernah dibahas dan sudah disetujui oleh sebagian besar parlemen Belanda. Di bentuknya Volksraad adalah langkah awal dari pemerintah negeri Belanda untuk menerapkan sistem pemerintahan yang desentralisasi di Hindia Belanda. Mengenai anggota dari Volksraad adalah semua perwakilan atau golongan yang berada di wilayah Hindia Belanda. Tentang anggota Volksraad pada awalnya berjumlah sekurang - kurangnya 39 anggota, seperempat dari anggota tersebut terdiri dari orang - orang Indonesia asli sedangkan tiga perempat lainnya terdiri dari orang - orang Eropa dan timur asing (G. Moadjanto, 1989 : 40). Terbentuknya Volksraad menurut kaum pergerakan nasional Indonesia sangat tepat sekali, dengan Volksraad inilah kaum pergerakan nasional Indonesia yang kemudian dapat mengajukan usul atau petisi. Petisi tersebut yang kemudian dikenal dengan nama petisi Soetardjo (Robert Van Niel, 1958 : 175).

Berdasarkan uraian tersebut maka sistem birokrasi pemerintahan kolonial Belanda dapat digambarkan sebagai berikut:

Sistem Birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda



Keterangan :

————> Garis Tugas

- - - - -> Garis Penyampaian Usul atau Petisi Soetardjo

2.3 Konclui Pergerakan Nasional Indonesia

Dengan berdirinya organisasi yang bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, pada saat itu mulai terjadi proses munculnya pergerakan nasional Indonesia yang bersikap moderat. Dr. Wahidin Sudirhusodo adalah salah seorang pelopor terbentuknya Budi utomo.

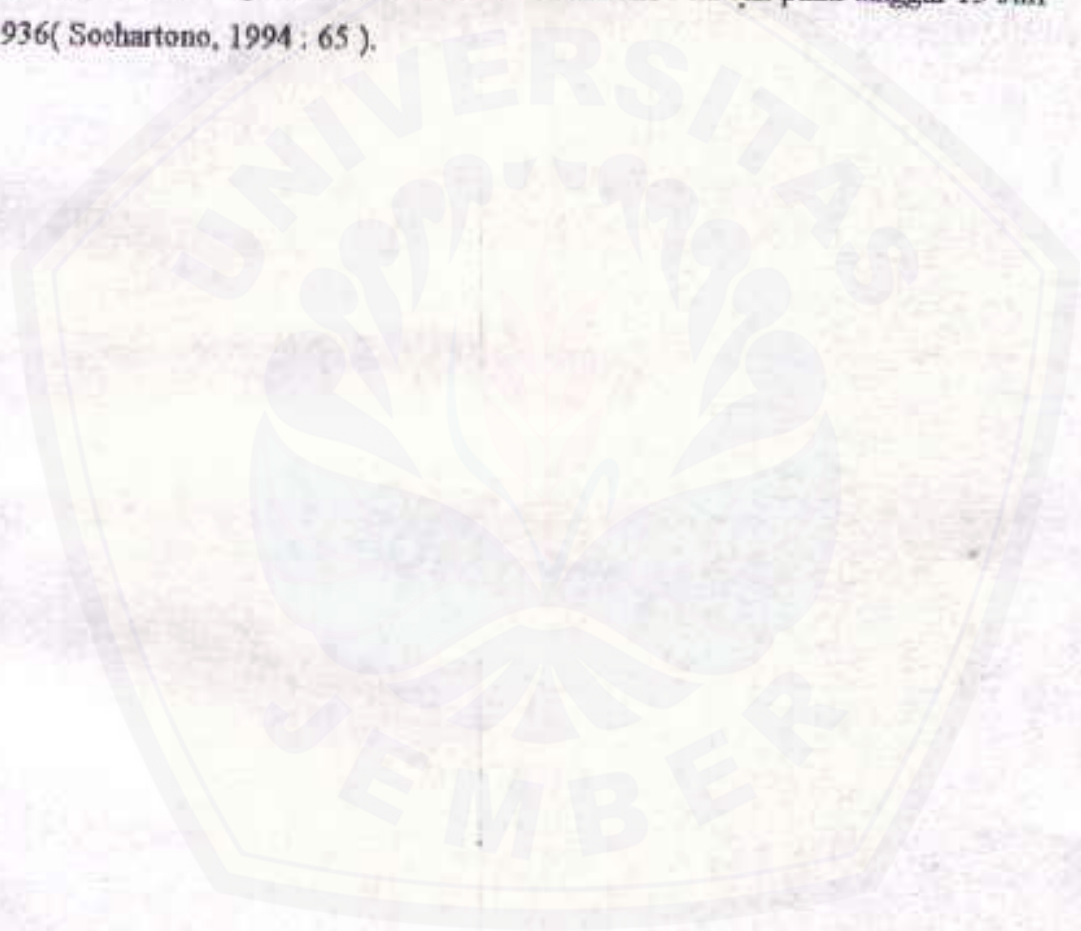
Budi Utomo bisa diartikan sebagai perangai atau tabiat yang baik. Tujuan didirikannya Budi Utomo adalah membentuk cita – cita yang luhur demi pergerakan nasional bangsa Indonesia. Budi Utomo adalah salah satu pergerakan yang pertama kali berdiri dan bersikap moderat. Dalam kegiatannya Budi Utomo tidak bisa terlepas dari kegiatan politik. Terbukti setelah munculnya berbagai macam bentuk pergerakan pada tahun 1920 Budi Utomo ikut terlibat dalam gerakan tersebut. Pergerakan di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi, yang dalam pokok pikirannya menganjurkan suatu taktik pergerakan yang dinamakan nonkooperasi. Budi Utomo dalam kongres tahun 1923 membicarakan tentang taktik perjuangan nonkooperasi, dalam kongres tersebut sebagian besar menolaknya, sebagian besar anggota menolak karena gerakan Budi Utomo dalam melakukan perjuangannya masih cenderung dengan menggunakan sikap kooperatif (Susanto Tirtoprodjo, 1984, 11 – 17).

Gerakan – gerakan di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok diantaranya yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda / nonkooperasi dan yang mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Misalnya PNI, kelompok ini bersikap tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Pergerakan ini didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Soekarno dan kawan – kawan (G. Moedjanto, 1989 : 48 – 49).

Gerakan nonkooperasi pada awalnya dipelopori oleh Syarekat Islam (SI) dan Partai komunis Indonesia (PKI). Setelah PKI mengalami kegagalan dalam pemberontakan tahun 1926 – 1927 kemudian dilanjutkan oleh FNI, sampai akhirnya gerakan nonkooperasi ini mengalami penurunan. Gerakan nonkooperasi mulai surut dan dapat dikatakan lumpuh bersamaan dengan terjadinya depresi ekonomi dan tindakan keras dari pemerintah kolonial Belanda sampai dengan tahun 1934. Tahun ini juga bisa dikatakan sebagai tahun krisis pergerakan. Bukan

saja yang terjadi pada partai politik, namun semua kelompok organisasi merasa pasrah menghadapi keadaan tersebut.

Partai kiri yang masih lunak dan mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda adalah Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO). Adapun salah satu cara yang dilakukan oleh kaum pergerakan nasional Indonesia adalah memanfaatkan modernisasi kehidupan politik perjuangan lewat parlemen yang kemudian ditandai dengan munculnya petisi Soetardjo. Petisi Soetardjo ditandatangani oleh Soetardjo Kartohadikusumo dan kawan - kawan pada tanggal 15 Juli 1936(Sohartono, 1994 : 65).



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan metode yang sesuai dengan bidang ilmunya, agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Sebelum memaparkan metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, maka perlu membahas terlebih dahulu pengertian metode penelitian tersebut.

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, *methodos* yang artinya jalan menuju sampai. Metode merupakan jalan, cara seseorang memperoleh pengetahuan (Helius Sjamsuddin, 1996:48). Sedangkan penelitian (*research*) oleh Sutrisno Hadi diartikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah (1989:4). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai tujuan, yaitu memecahkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan atau teori yang dilakukan secara ilmiah.

Menurut Mohammad Nazir, metode penelitian dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu: (1) metode penelitian sejarah, (2) metode penelitian deskriptif, (3) metode penelitian eksperimental, (4) metode *grounded research*, dan (5) metode penelitian tindakan (1988: 54). Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan metode penelitian sejarah (*historical research methods*). Penggunaan metode penelitian sejarah ini terutama sekali didasarkan pada pertimbangan bahwa metode penelitian sejarah itulah yang paling sesuai dengan masalah yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini.

Pada penelitian sejarah dikenal empat jenis penelitian, yaitu: (1) penelitian sejarah komparatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian biografis, dan (4) penelitian bibliografis (Moh. Nazir, 1995: 61-62). Penelitian yang penulis lakukan ini apabila dilihat dari sumber datanya, termasuk penelitian bibliografis. Penelitian bibliografis ini oleh Hadari Nawawi disebut juga penelitian kepustakaan, yaitu

kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data-data dari berbagai literatur baik yang ada di perpustakaan-perpustakaan maupun di tempat-tempat lain (1991:30).

3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian sejarah adalah proses menguji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Helius Sjamsuddin, 1996:19). Menurut Gilbert J. Gerraghan yang dikutip oleh Nugroho Notosusanto, pengertian metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi penyusunan ceritera sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesis dari hasil-hasilnya (1971: 10-11). Louis Gottschalk mendefinisikan metode penelitian sejarah sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (1975:32). Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian metode penelitian sejarah adalah suatu proses yang harus dilaksanakan oleh sejarawan dalam mencari sumber, menilai secara kritis, menginterpretasikan yang selanjutnya menuangkan ke dalam bentuk tulisan sehingga menjadi kisah sejarah yang kronologis, sistematis dan logis.

Langkah-langkah penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk yang dikutip Nugroho Notosusanto di bagi menjadi empat langkah, yaitu : (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, dan (4) historiografi (1971:17).

3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti sejarah dalam menyusun cerita sejarah. Kata heuristik berasal dari kata Yunani heuriskein yang berarti menemukan (Nugroho Notosusanto, 1971:18). Dalam hal ini maksudnya adalah menemukan sumber-sumber yang disebut sebagai jejak-jejak sejarah. Senada dengan pendapat tersebut IG. Widja mengatakan, bahwa heuristik adalah mencari atau menemukan sumber-sumber sejarah sebagai bahan guna penyusunan kisah atau ceritera sejarah (1988:19). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa heuristik adalah langkah pertama dalam penelitian

sejarah yang merupakan suatu proses mencari untuk menemukan sumber-sumber sejarah. Dalam penelitian ini, dengan langkah heuristik dapatlah dikumpulkan buku-buku sebagai sumber penelitian skripsi ini, yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu : (1) buku-buku pokok, yang di dalam daftar kepustakaan skripsi ini diberi kode *), (2) buku-buku penunjang.

3.2.2 Kritik

Bila seorang peneliti sejarah sudah berhasil mengumpulkan jejak-jejak sejarah sebagai sumber cerita sejarah, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah adalah melakukan kegiatan kritik. Kritik adalah kegiatan menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak (sumber-sumber) yang benar, dalam arti benar-benar diperlukan, asli dan mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun (IG. Widja, 1988:21). Nugroho Notosusanto berpendapat, bahwa kritik dimaksudkan untuk mendapatkan sumber-sumber sejarah yang valid dan reliabel, karena sumber tersebut masih berupa bahan mentah belaka yang harus disusun menjadi fakta sejarah (1971:41).

Daam hal kritik sumber terbagi menjadi dua tahap, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai atau omentik suatu sumber dengan mempertanyakan apakah sumber itu asli atau tidak (Nugroho Notosusanto, 1971: 20). Sedangkan kritik intern dilakukan setelah melakukan kritik ekstern. Kritik intern bertujuan untuk meneliti kebenaran isi sumber (Winarno Surakhmad, 1990:135). Kritik intern bertalian dengan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang kita butuhkan, dan harus dapat membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh sumber itu dapat dipercaya, yang dapat diperoleh dengan menilai secara kritis terhadap sumber dengan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber lain.

3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga dalam metode sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah terhimpun (Nugroho Notosusanto, 1971:17). Fakta-fakta sejarah itu

perlu dihubung-hubungkan dan dikar-kaitkan satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu rangkaian yang masuk akal dan menunjukkan kesesuaian satu dengan yang lainnya (I.G. Widja, 1988:23).

3.2.4 Historiografi

Historiografi atau penyajian merupakan langkah terakhir dalam penelitian sejarah. Sesudah melakukan analisis data yaitu menginterpretasikan fakta-fakta sejarah dan selanjutnya hasil interpretasi dituangkan ke dalam bentuk tulisan sejarah. Dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang perlu dipasang dalam penulisan sejarah adalah prinsip kronologis atau urutan waktu, prinsip kausalitas atau hubungan sebab-akibat dan prinsip kemauan imajinas atau prinsip menghubungkan-hubungkan peristiwa yang terpisah menjadi rangkaian cerita yang masuk akal (I.G. Widja, 1988:24).

Penyajian atau historiografi adalah kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan fakta yang diperoleh (Louis Gottschalk, 1975:32). Untuk melukiskan peristiwa secara urut, obyektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi dalam peristiwa itu, maka imajinasi penulis memegang peranan penting dalam arti menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain secara harmonis sehingga rantinya akan tercipta kisah sejarah yang ilmiah.

3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Dilihat dari wujudnya, sumber-sumber sejarah dibagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) sumber benda (bangunan, perkakas dan senjata), (2) sumber tertulis (dokumen), dan (3) sumber lisan (hasil wawancara) (Nugroho Notosusanto, 1971:18). Buku-buku termasuk dalam sumber tertulis dan digolongkan ke dalam dokumen dokumen yang dapat diperoleh di perpustakaan. Dengan demikian sifat penelitian seperti yang penulis lakukan ini adalah studi kepustakaan dan penelitian bibliografis atau studi dokumenter.

Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun data-data dari berbagai bacaan atau literatur yang ada di perpustakaan (Hadari Nawawi, 1991:39). Hal ini senada dengan pendapat Kartini

Kartono yang mengatakan, bahwa studi kepustakaan dilakukan di perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data/ informasi dengan bantuan bermacam-macam bahan yang terdapat di perpustakaan berupa naskah, majalah, dan catatan-catatan lain (1990:33). Jadi kegiatan mengumpulkan data lebih banyak dilakukan di perpustakaan meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan di tempat lain.

Metode yang penulis gunakan dalam memilih dan menentukan perpustakaan yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Purposive Sampling. Menurut Sutrisno Hadi, penggunaan metode Purposive Sampling berlandaskan pada pemilihan sekelompok subyek (populasi) yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, (1989: 82). Secara etimologis, purposive berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti sengaja atau tujuan. Bertolak dari pendapat dan keterangan di atas, maka penentuan tempat penelitian ini memang ditentukan secara sengaja dengan alasan dan pertimbangan bahwa penulis telah biasa masuk dan menggunakan perpustakaan tersebut, sehingga penulis tahu buku-buku sumber yang diperlukan dalam penelitian ini. Menurut penulis telah tersedia di perpustakaan yang penulis pilih.

Cara kerja untuk menentukan tempat penelitian ini, yaitu dengan melihat perpustakaan-perpustakaan yang ada di Jember sebagai populasinya yang meliputi : (1) UPT Perpustakaan - Universitas Jember; (2) Perpustakaan Jurusan Pendidikan IPS FKIP-Universitas Jember; (3) Koleksi Pustaka Jurusan Sejarah Fakultas Sastra - Universitas Jember, (4) Perpustakaan FISIP - Universitas Jember dan sebagainya. Dalam mengambil sampel perpustakaan-perpustakaan yang penulis gunakan tersebut, penulis mendasarkan diri pada ciri-ciri atau keadaan dari perpustakaan-perpustakaan yang ada secara keseluruhan, kemudian secara sengaja dan intensional menetapkan perpustakaan-perpustakaan tertentu yang penulis ketahui betul kondisinya dan menyediakan buku-buku yang penulis gunakan untuk memperoleh data guna memecahkan permasalahan yang penulis ajukan. Dengan metode purposive sampling tersebut, maka perpustakaan yang penulis pilih sebagai tempat penelitian, yaitu: (1) UPT Perpustakaan - Universitas Jember, (2) Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah FKIP-

Universitas Jember, ditambah juga dengan buku-buku koleksi pribadi sebagai pelengkap.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan kunci dalam proses pelaksanaan penelitian. Mengingat penelitian yang penulis lakukan bersifat studi kepustakaan, maka metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumenter. Menurut Hadari Nawawi, yang dimaksud dengan metode dokumenter adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan-peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip tentang pendapat-pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian (1991:133). Metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumenter. Artinya, sumber datanya berupa dokumen, yaitu buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode dokumenter adalah metode pengumpulan data dengan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, memuat hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan intensitasnya, sumber-sumber data penelitian ini adalah sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang paling banyak dipakai sebagai acuan dalam penelitian, sedangkan sumber penunjang adalah sumber yang berfungsi melengkapi sumber-sumber pokok.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah berhasil mengumpulkan data, maka langkah berikutnya adalah mengadakan analisis data, yaitu melakukan kritik dan interpretasi. Berkaitan dengan penggunaan metode sejarah sebagai alat bantu untuk merekonstruksi masa lampau secara ilmiah, diperlukan kemampuan berfikir logis dan imajinatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode filosofik.

Metode filosofik adalah prosedur pemecahan permasalahan melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalami dan mendasar tentang hakekat sesuatu, baik menggunakan pola berpikir aliran filsafat tertentu, maupun dalam bentuk analisis sistematis berdasarkan pola berpikir induktif, deduktif,

fenomenologis, dan lain-lain (Hadari Nawawi, 1991:62). Metode filosofik ini sangat cocok dipakai dalam penelitian sejarah sebab tidak tepat bila sejarah hanya semata-mata bertujuan untuk menciptakan suatu cerita, tetapi yang lebih pokok adalah membuat uraian yang memakai penalaran logis, kritis, dan mendalam (Sartono Kartodirdjo, 1992:23). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metode filosofik adalah cara yang digunakan dengan berpikir yang teratur menurut urutan yang tepat sehingga menghasilkan pengetahuan yang sistematis, mendekati kebenaran, dan masuk akal. Dalam menerapkan metode filosofik tersebut penulis menggunakan teknik logika induktif dan teknik logika komparatif, yang penggunaannya dilakukan secara simultan (bersama-sama), tidak secara sendiri-sendiri, dengan langkah kritik dan interpretasi.

3.5.1. Teknik Logika Induktif

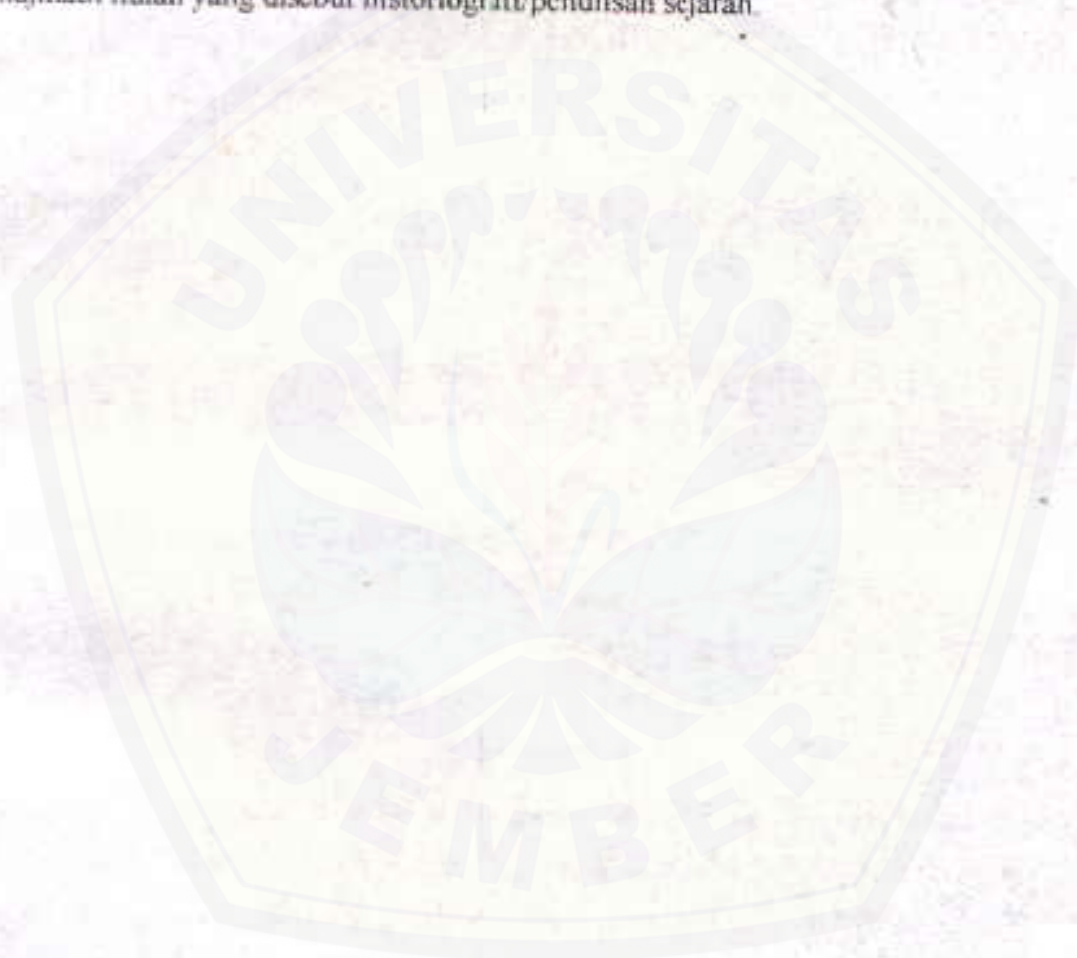
Teknik logika induktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus/tertentu atau fakta-fakta yang bersifat individual, untuk sampai pada kesimpulan yang bersifat umum (Hadari Nawawi, 1991: 18). Pendapat di atas didukung oleh Sutrisno Hadi yang mendefinisikan teknik logika induktif sebagai cara berpikir yang berlandaskan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari faktor-faktor yang khusus dan kongkret itu dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum (1989:42)

3.5.2. Teknik Logika Komparatif

Teknik logika komparatif adalah cara yang digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan berbagai fenomena untuk mencari faktor apa dan situasi bagaimana yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa (Mohammad Ali, 1986: 123). Menurut Winarno Surakhmad, studi komparatif digunakan dalam suatu penelitian untuk meneliti hubungan lebih dari satu fenomena yang sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari suatu peristiwa (1990:136). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa teknik logika komparatif adalah proses membandingkan data yang satu dengan yang lain untuk melukiskan fakta atau

peristiwa sejarah untuk dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang masuk akal, sistematis, dan obyektif.

Sesudah data-data yang dianalisis dengan metode filosofik secara teknik induktif dan komparatif tersebut di atas, berhasilah dirumuskan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta itu sesudah terkumpul semua, lalu disusun secara kronologis dan sistematis, dirangkaikan secara majinatif menjadi ceritera sejarah yang diinginkan. Menyusun ceritera sejarah dari data-data menjadi fakta-fakta dan kemudian menjadi ceritera sejarah yang kronologis, sistematis, dan logis serta imajinatif itulah yang disebut historiografi/penulisan sejarah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo yaitu melalui Volksraad dan di luar Volksraad. Kaum pergerakan nasional Indonesia bersikap ada yang mendukung dan ada yang menolak namun akhirnya petisi menjadi petisi Volksraad. Setelah diajukan kepada pemerintah negeri Belanda dan Ratu kemudian Petisi di tolak. Ditolakny petisi kemudian membawa dampak bagi kaum pergerakan nasional Indonesia dengan ditadai berdirinya GAPI

5.2 Saran - Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis memberikan saran kepada:

1. mahasiswa calon guru sejarah, hendaknya lebih banyak membaca literatur tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan dan memperdalam penguasaan materi,
2. pembaca, hendaknya setelah membaca skripsi ini bisa memetik hikmah dari perjuangan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan petisi Soetardjo, bahwa untuk menempuh segala macam bentuk perjuangan sebaiknya disiapkan langkah yang lebih matang dan dilakukan bulan dengan jalan meminta-minta.
3. almamater, hendaknya selalu memberi motivasi kepada mahasiswa maupun kepada seluruh civitas akademika dalam pelaksanaan penelitian sejarah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian sejarah, juga hendaknya almamater lebih meningkatkan pelayanan dan penyediaan buku - buku (literatur) khususnya yang berhubungan dengan sejarah pergerakan nasional Indonesia agar penelitian ini dapat terus dikembangkan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad Subardjo Djejoadisuryo, 1978, Kesadaran Nasional Sebuah Otobiografi, Gunung Agung, Jakarta. *)
- Anhar Gonggong, 1985, M.H. Thamrin, Depdikbud - Direktorat Infentarisasi Dokumen Sejarah Nasional, Jakarta. *)
- Blumberger, 1970, De Nationalitissche Beweging, Vitgeverij, Jakarta
- Cahyo Budi Utomo, 1995, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan, IKIP Semarang Press, Semarang. *)
- C.S.T. Kansil, Julianto, 1977, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, Erlangga, Jakarta. *)
- Departemen Agama RI, 1971, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mahkota Jakarta
- G. Moedjanto, 1993, Indonesia Abad ke- 20 Jilid 1, Kanisius, Yogyakarta. *)
- Gottschalk, Louis, 1975, Mengerti Sejarah, t erjemahan Nugroho Notosusanto, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.
- Hadari Nawawi, 1991, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Helius Sjamsuddin, 1996, Metodologi Sejarah, Depdikbud - Dirjen Dikti, Jakarta
- L.G. Widja, 1988, Pengantar Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Pendidikan, Satya Wacana, Semarang.
- Kahin, George Mc. Turnan, 1985, Nasionalisme Dan Revolusi Indonesia , terjemahan Nin Bakdi Sumanto, UNS Press, Surakarta. *)
- Ingleson, 1983, Jalan Menuju Kepengasingan Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927 - 1934, Terj Zamarkhasi Dhofir, IP3ES, Jakarta.
- Iwa Kusuma Sumantri, 1963, Sejarah Revolusi Indonesia Jilid 1 Mzsa Perjuangan Sebagai Perintis Revolusi, Grafiti Press, Jakarta. *)

- Kartini Kartono, 1990, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung.
- Koentjaraningrat (Red), 1991, Metode Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.
- Koch, E. M. G., 1951, Menuju Kemerdekaan Indonesia, terjemahan Abdul Muis, Yayasan Pembangunan, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1971, Iktisar Sejarah Pergerakan Nasional 1908-1942, Pusat Sejarah ABRI Departemen Hankam, Jakarta.
- , 1971, Norma-norma Dasar Penelitian Dan Penulisan Sejarah, Departemen Pertahanan dan Keamanan - Pusat sejarah ABRI, Jakarta.
- Marwati Djoened Poetonegoro, Nugroho Notosusanto, 1992, Sejarah Nasional Indonesia V, Balai Pustaka, Jakarta. *)
- Mohammad Ali, 1986, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi, Angkasa, Bandung.
- Moh. Nazir, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ricklefs, M.C, 1989, Sejarah Indonesia Modern, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. *)
- R.Z. Leireissa, 1985, Terwujudnya Suatu Gagasan Sejarah Masyarakat Indonesia 1900 Sampai 1950, LP3ES, Jakarta. *)
- Sagimun M.D, 1989, Peranan Pemuda Dari sumpah Pemuda Sampai Proklamasi, Bina Aksara, Jakarta. *)
- Sartono Kartodirdjo, 1990, Pengantar Sejarah Indonesia Baru Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2 Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Gramedia, Jakarta. *)
- Setiadi Kartohadi Kusumo, 1990, Soetardjo Pembuat Petisi Petisi Soetardjo Dan Perjuangannya, Sinar Harapan, Jakarta. *)
- Slamet Mulyana, 1986, Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan, Inti Idayu Pres, Jakarta. *)

Sri Sutjatningsih, 1983, Otto Iskandar Dinata, Depdikbud - Direktorat Inventarisasi dan dokumen Sejarah Nasional, Jakarta. *)

Subartono, 1994, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. *)

Subarsimi Arikunto, 1991, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Bina Aksara, Jakarta.

Susanto Tirtoprodjo, 1986, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, P.T. Pembangunan, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, Metodologi Research I, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Van Niel Robert, 1984, Munculnya Elit Modern Indonesia, Pustaka Jaya, Jakarta

Winarno Surahmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Tarsito, Bandung.

Keterangan:

*) : Buku Pokok.

Lampiran 1:

MATRIK PENELITIAN

| Judul | Variabel Penelitian | Jenis dan Sifat Penelitian | Permasalahan | Sumber Data | Metode Penelitian |
|--|--|---|--|---|---|
| 1 Peranan kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan Petis Soetardjo | 2 1. Kaum pergerakan nasional Indonesia 2. Petis Soetardjo | 3 Jenis: Penelitian historik Sifat: studi literatur | 4 Bagaimana tahap peranti kaum pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan Petis Soetardjo ? | 5 Buku pokok 17 buah. Buku penunjang 15 buah. | 6 1. Metode penentuan tempat penelitian; purposive sampling 2. Metode pengumpulan data: dokumenter 3. Metode analisis data: metode filosofik dengan teknik logika induktif dan logika komparatif |



UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kalimantan III/24 PO. BOX 198 Jember 68121
Telp. (0331) 83860, 88261 Fax. (0331) 88201
E-mail lib-unoj@indo.net.id

SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR NOMOR: 93/J25.51/TU.3 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NURHASYIM**
NIM : **9402105204**
Jur/Program : **Pend IPS / Pend Sejarah**
Fakultas : **KIP**
Angkatan : **1994**

Terhitung mulai bulan **Desember** sampai bulan **Februari** telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan jadwal sebagai berikut :

| Tanggal | Tempat | | | |
|------------|--------------|------------|-------|------------|
| | R. Sirkulasi | R. Referen | R. OR | R. Skripsi |
| 27-12-1999 | X | | | |
| 3- 1-2000 | | | | X |
| 10- 1-2000 | | X | | |
| 15- 1-2000 | | X | | |
| 24- 1-2000 | | X | | |
| 31- 1-2000 | | | X | |
| 7- 2-2000 | X | | | |
| 15- 2-2000 | | | | X |
| 21- 2-2000 | | | X | |

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 - 4 - 2000
Kepala Perpustakaan
Dra. Budiwati, S.Sos.
NIP. 130 683 181

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Nurhasyim
 2. Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 09 Mei 1973
 3. Agama : Islam
 4. Nama Ayah : Sudarmana
 5. Agama : Islam
 6. Pekerjaan : Wiraswasta
 7. Nama Ibu : Kasilah
 8. Agama : Islam
 9. Pekerjaan : Wiraswasta
 10. Alamat
 - Asal : Blok Caplek No. 07 Kel. Padangsari RT. 04/V
 Majenang Cilacap.
 - Jember : Jl. Kalimantan X/111 Jember.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Sekolah | Tempat | Tahun Lulus |
|----|---------|-------------------------|-------------|
| 1. | SD | SDN Ampel II Boyolali | 1986 |
| 2. | SMP | SMP GD Aji II Lampung | 1989 |
| 3. | SMA | SMA P. Majenang Cilacap | 1992 |

C. KEGIATAN ORGANISASI

| No | Nama Organisasi | Tempat | Tahun |
|----|-------------------|--------------------------|-------------|
| 1. | Pramuka | SDN Ampel II Boyolali | 1985 - 1986 |
| 2. | OSIS | SMP GD Aji II Lampung | 1987 - 1988 |
| 3. | OSIS | SMA P. Majenang Cilacap | 1990 - 1991 |
| 4. | HMP Petd. Sejarah | FKIP- Universitas Jember | 1996 - 1998 |
| 5. | GMNI | DPC. Jember | 1998 - 2000 |

DAFTAR RALAI

| Nomor | Baris ke dari | | Terketik | Seharusnya |
|---------|---------------|------|----------|------------|
| Halaman | Bawah | Atas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |